

Penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Hasil dari Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai

Yusuf Munandar*, Rina Karlina, Ali Moechtar, Johan Kasim, Cipto Adhi

Setiawan, Lalu Muhammad Azmi Prasetya

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

*Email korespondensi: yusufmunandar@yahoo.co.id

Abstract

At the beginning of 2020, the Indonesian government issued a stimulus policy to reduce the impact of Covid-19, namely the Sembako Card program or the updated BPNT program. One of the objectives of implementing the BPNT program in East Java Province is to reduce income inequality in the East Java Province. Thus, this study aims to calculate and obtain a reduction in the Gini Ratio due to implementing the BPNT program in East Java Province. This study uses the Counter Factual Analysis (CFA) method and March 2020 Susenas data. This study concludes that implementing the BPNT program in 2020 can reduce the level of income inequality in East Java Province, Indonesia, which can reduce the Gini Ratio of East Java Province by -1.10%. District of Situbondo, District of Bondowoso, and District of Pamekasan are the three districts/cities in East Java Province with the most significant decline in the Gini Ratio for East Java Province, Gini Ratio for Women in East Java Province, and Gini Ratio for Men in East Java Province. City of Blitar, City of Surabaya, and the City of Malang are the three cities in East Java Province with the smallest decline in the Gini Ratio for East Java Province, Gini Ratio for Women in East Java Province, and Gini Ratio for Men in East Java Province. This study recommends that the government of East Java Province encourage the government of Blitar City, Malang City, and Surabaya City to strengthen the implementation of BPNT and increase the effectiveness of BPNT so that the performance of BPNT can reduce the Gini Ratio even more.

Keywords: non-cash food assistance, inequality level, gini ratio, counter factual analysis.

Abstrak

Pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mengurangi dampak Covid-19 yaitu program Kartu Sembako atau program BPNT yang diperbarui. Salah satu tujuan dari diterapkannya program BPNT di Provinsi Jawa Timur adalah untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Demikianlah, penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan mendapatkan angka penurunan Rasio Gini sebagai hasil dari penerapan program BPNT di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode Counter Factual Analysis (CFA) dan data Susenas Maret 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan program BPNT pada 2020 dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur Indonesia yaitu mampu menurunkan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur sebesar -1,10%. Kabupaten Situbondo,

Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Pamekasan adalah tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan penurunan terbesar pada Rasio Gini Provinsi Jawa Timur, Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur, dan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur. Kota Blitar, Kota Surabaya dan Kota Malang adalah tiga kota di Provinsi Jawa Timur dengan penurunan terkecil pada Rasio Gini Provinsi Jawa Timur, Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur, dan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Surabaya untuk memperkuat penerapan BPNT dan meningkatkan efektivitas BPNT sehingga penerapan BPNT bisa menurunkan Rasio Gini lebih besar lagi.

Kata kunci: bantuan pangan non tunai, tingkat ketimpangan, rasio gini, analisis counterfactual.

Latar Belakang

Pada awal pandemi Covid-19 yaitu Maret 2020, tingkat ketimpangan Provinsi Jawa Timur menurun dilihat dari Rasio Gini yang menurun dari sebesar 0,370 pada Maret 2019 menjadi sebesar 0,366 pada Maret 2020. Secara hipotesis diduga penurunan tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tersebut adalah karena keberhasilan dari program pemerintah salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pertanyaan yang muncul adalah berapakah penurunan Rasio Gini sebagai hasil dari penerapan program BPNT pada awal tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur? Demikianlah, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menghitung dampak program BPNT terhadap penurunan Rasio Gini pada Maret tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian mengenai penurunan Rasio Gini sebagai hasil dari penerapan program BPNT di masa pandemi Covid-19 dilakukan oleh Munandar (2021). Penelitian tersebut dilakukan terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penerapan program BPNT pada masa pandemi Covid-19 yaitu triwulan pertama tahun 2020 mampu mengurangi Rasio Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar -0,43%. Tanpa menerapkan program BPNT, Rasio Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2020 adalah 0,2634. Dengan menerapkan program BPNT, Rasio Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun menjadi 0,2623 atau menurun sebesar -0,43% atau -0,0011 poin Rasio Gini. Dengan mengacu kepada penelitian dari Munandar (2021), penelitian ini hendak mencoba menghitung

penurunan Rasio Gini pada Maret 2020 sebagai hasil dari penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai di Provinsi Jawa Timur.

Jadi pertanyaan penelitian ini adalah berapa penurunan Rasio Gini pada Maret 2020 sebagai hasil dari penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai di Provinsi Jawa Timur? Penelitian ini bertujuan untuk menghitung penurunan Rasio Gini pada Maret 2020 sebagai hasil dari penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai di Provinsi Jawa Timur.

Tinjauan Pustaka

Beberapa peneliti telah meneliti mengenai efektivitas program BPNT, tetapi hasil dari penelitian tersebut adalah mengenai efektivitas pelaksanaan program BPNT, bukan seberapa persen BPNT bisa menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan atau Rasio Gini. Sebagai contoh penelitian oleh Rosalina dan Hardjati (2019) yang menyimpulkan bahwa dari aspek waktu, pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya telah terlaksana secara tepat waktu, dari sisi ketepatan pilihan, pelaksanaan program BPNT masih memerlukan perbaikan karena kurang beragamnya pilihan pangan dalam program BPNT, dari sisi target, pelaksanaan program BPNT belum tepat sasaran karena ada beberapa penerima BPNT yang menumpuk dana BPNT yang menunjukkan bahwa keluarga penerima BPNT tersebut dalam kondisi layak sehingga seharusnya tidak berhak menerima BPNT.

Hal yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh Belanawane, et al. (2019) yang mengkaji penyaluran BPNT di Desa Lemahbang Kulon dan Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Salah satu temuannya adalah bahwa ketika belum ada surat edaran Kementerian Sosial yang menetapkan bahwa penyedia komoditas BPNT adalah Perum Bulog, e-warong (yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa/Bumdes) dalam penetapan harga dilakukan survei terlebih dulu ke toko-toko yang menjual beras sehingga harga yang ditetapkan oleh e-warong tidak melebihi harga di toko-toko bahkan jauh lebih murah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT menyatakan bahwa harga beras dan telur yang didapatkan melalui BPNT lebih murah apabila dibandingkan dengan harga di toko. Setelah

terdapat surat edaran Kementerian Sosial yang menetapkan bahwa penyedia komoditas BPNT adalah Perum Bulog, KPM menyatakan tidak bisa membandingkan harga beras BPNT dengan harga beras di toko karena tidak ada beras dengan kualitas sebaik itu di toko. Selain itu, KPM menyatakan bahwa beras dari Perum Bulog secara kasat mata memang bagus (berwarna putih dan butiran patah yang sedikit) namun demikian ketika dimasak rasanya kurang enak yaitu agak keras.

Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2018) dalam kajiannya menemukan bahwa penyaluran program BPNT di Desa Sambonggede bisa meningkatkan pendapatan Bumdes Sambang (Bumdes dari Desa Sambonggede Bangkit) dan akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sambong Gede. Hal tersebut dilakukan dengan cara Bumdes Sambang diarahkan menjadi pemasok bahan-bahan pokok makanan komoditi BPNT yang dapat disiapkan oleh Desa Sambonggede sendiri.

Penyaluran BPNT di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dikaji oleh Wiyaka & Murti (2018) dengan hasil bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT memberikan peluang usaha baru bagi pengusaha mikro dan menengah sehingga dapat mendorong pertumbuhan e-warong KUBE yang dikelola oleh penerima BPNT yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu di pedesaan.

Peneliti lain yang mengkaji efektivitas penerapan program BPNT adalah Rachman, Agustian, & Wahyudi (2018). Mereka mengkaji efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT secara nasional dari aspek 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi. Hasil dari penelitian mereka adalah bahwa pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warong di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan defisit beras.

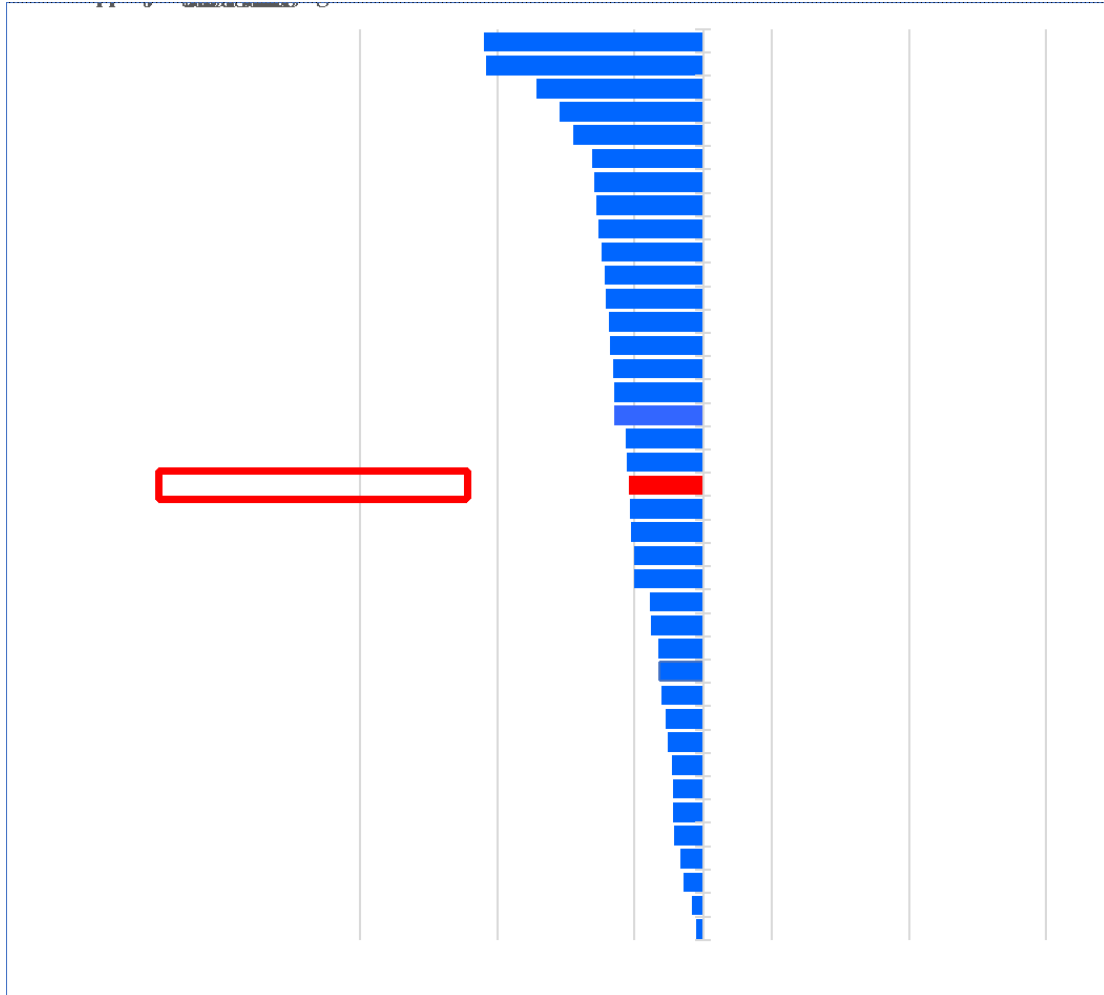
Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode Counterfactual Analysis (CFA) yang juga digunakan oleh Bank Dunia dalam menghitung Commitment to Equity (CEQ). Analisis Counterfactual adalah membandingkan antara kondisi aktual (dengan intervensi pemerintah) dengan kondisi tanpa intervensi pemerintah (Darinda & Moechtar, 2019). Penelitian ini menggunakan data Susenas Maret 2020 yang disusun oleh BPS Indonesia (BPS Indonesia, 2020). Pertama, penelitian ini menghitung Rasio Gini pada Maret 2020 dari Provinsi Jawa Timur Indonesia seandainya program BPNT tidak diterapkan. Kondisi ini merupakan kondisi tanpa intervensi dari pemerintah. Kedua, penelitian ini menghitung Rasio Gini pada Maret 2020 dari Provinsi Jawa Timur dengan penerapan program BPNT. Kondisi tersebut merupakan kondisi dengan adanya intervensi oleh pemerintah berupa program BPNT. Terakhir, penelitian ini menghitung penurunan Rasio Gini dari Provinsi Jawa Timur sebagai hasil dari diterapkannya program BPNT.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penurunan Rasio Gini sebagai hasil dari penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar -1,10%. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1.
**Persentase Penurunan Rasio Gini Sebagai Hasil dari Penerapan Program BPNT
di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Maret 2020¹**

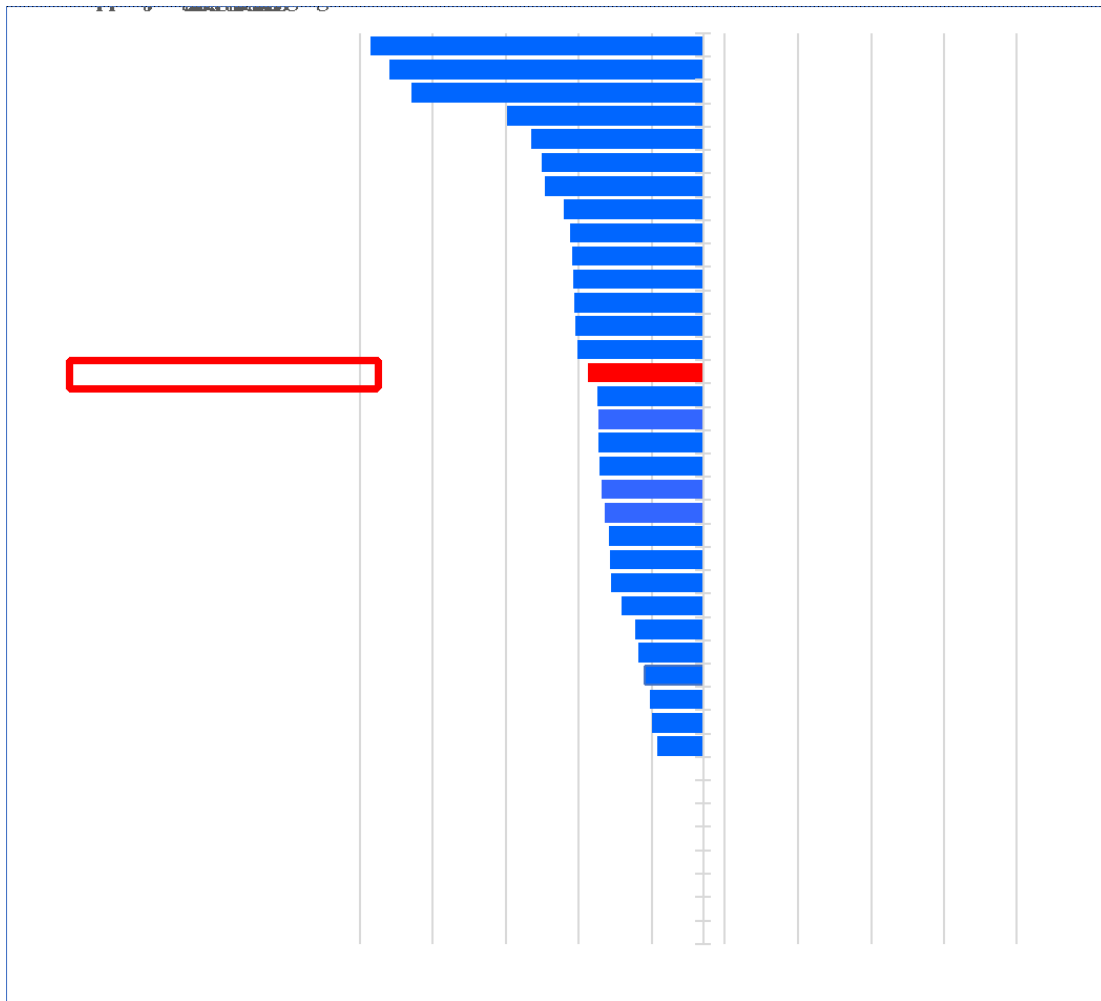


¹ Dihitung dari BPS Indonesia (2020).

Penelitian ini menemukan penurunan Rasio Gini Perdesaan sebagai hasil dari penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar -1,59%. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada Grafik 3.

Grafik 3.

Persentase Penurunan Rasio Gini Perdesaan Sebagai Hasil dari Penerapan Program BPNT di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Maret 2020³

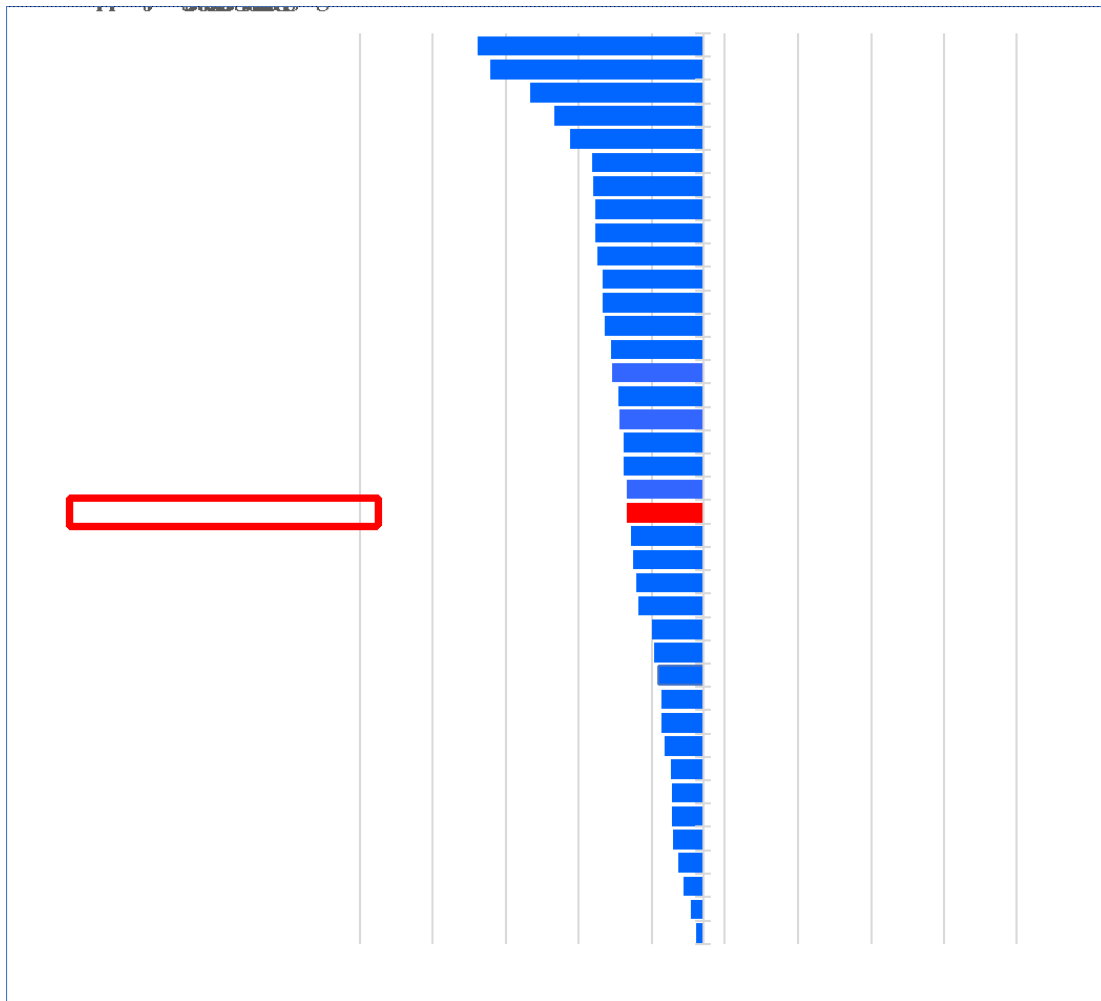


³ Sumber: Dihitung dari BPS Indonesia (2020).

Penelitian ini menemukan penurunan Rasio Gini Laki-laki sebagai hasil dari penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar -1,59%. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada Grafik 4.

Grafik 4.

Persentase Penurunan Rasio Gini Laki-laki Sebagai Hasil dari Penerapan Program BPNT di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Maret 2020⁴

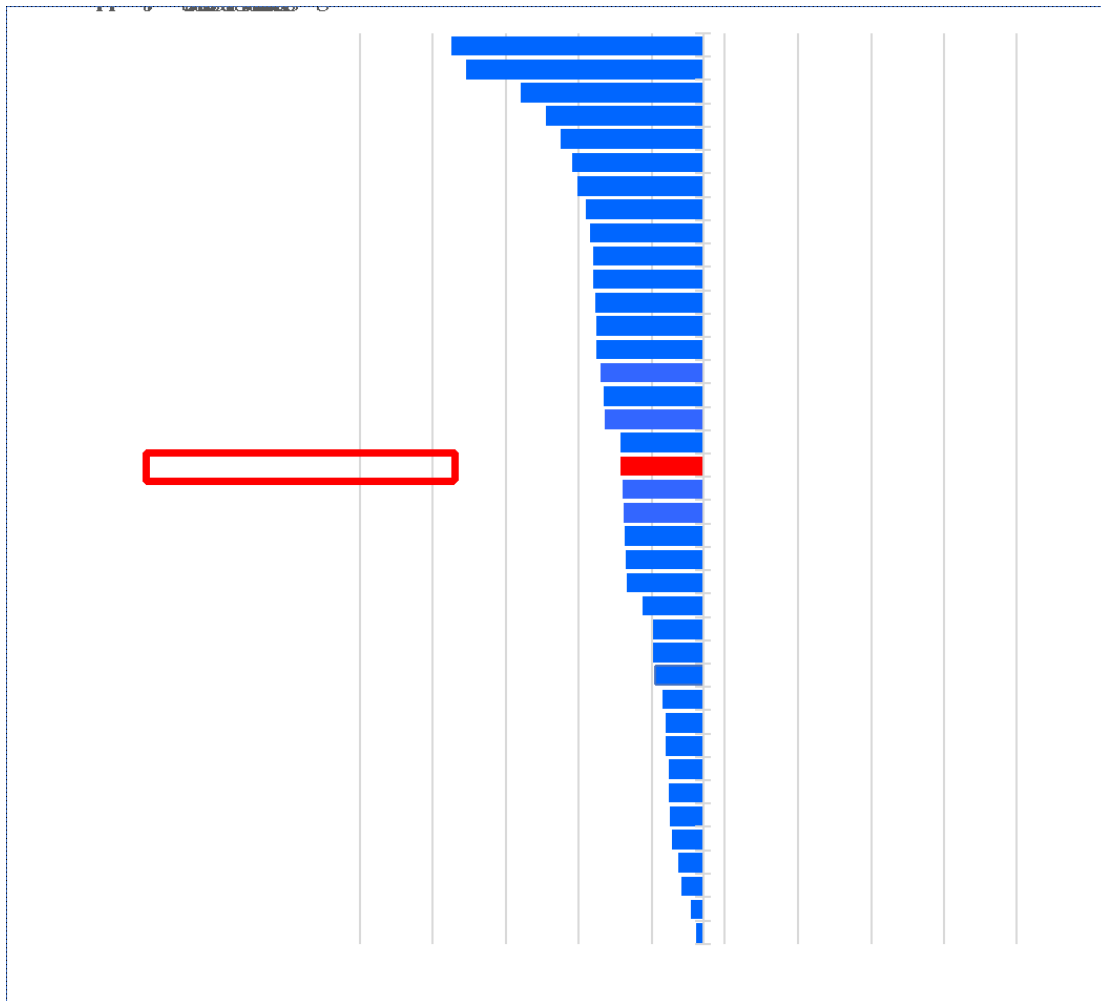


⁴ Sumber: Dihitung dari BPS Indonesia (2020).

Penelitian ini menemukan penurunan Rasio Gini Perempuan sebagai hasil dari penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar -1,14%. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada Grafik 5.

Grafik 5.

Persentase Penurunan Rasio Gini Perempuan Sebagai Hasil dari Penerapan Program BPNT di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Maret 2020⁵



⁵ Sumber: Dihitung dari BPS Indonesia (2020).

Diskusi

Penelitian ini menemukan bahwa upaya menurunkan tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur melalui penerapan program BNPT pada masa pandemi Covid-19 yaitu triwulan pertama tahun 2020 mampu menurunkan Rasio Gini sebesar -1,10% atau -0,0041 poin. Tanpa penerapan program BPNT, Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah sebesar 0,3705. Dengan adanya penerapan program BPNT pada Januari sampai Maret 2020, Rasio Gini Provinsi Jawa Timur menurun menjadi sebesar 0,3664 atau terjadi penurunan Rasio Gini sebesar -1,10% atau -0,0041 poin sebagai hasil dari diterapkannya program BPNT, *ceteris paribus* yaitu dengan mengasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi Rasio Gini selain program BPNT adalah tetap.

Sebanyak 19 kabupaten memiliki penurunan Rasio Gini lebih besar dari -1,10% atau di atas penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 19 kabupaten tersebut berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 19 kabupaten/kota mengalami penurunan Rasio Gini lebih kecil dari -1,10% atau di bawah penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 19 kabupaten/kota tersebut *kurang* berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur. Tiga kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kabupaten Situbondo dengan penurunan Rasio Gini sebesar -3,20%, Kabupaten Bondowoso dengan penurunan Rasio Gini sebesar -3,18%, dan Kabupaten Pamekasan dengan penurunan Rasio Gini sebesar -2,44%. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terendah terhadap penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kota Blitar dengan penurunan Rasio Gini sebesar -0,11%, Kota Surabaya dengan penurunan Rasio Gini sebesar -0,18%, dan Kota Malang dengan penurunan Rasio Gini sebesar -0,30%.

Penurunan Rasio Gini di pedesaan (-1,59%) lebih besar daripada di perkotaan (-0,73%). Tanpa adanya penerapan program BPNT, Rasio Gini Perdesaan adalah sebesar 0,3212. Setelah program BPNT diterapkan, Rasio Gini Perdesaan turun menjadi sebesar 0,3161 atau turun sebesar -1,59% atau -0,0051 poin. Sebanyak 14 kabupaten/kota memiliki penurunan Rasio Gini Perdesaan lebih besar dari -1,59% atau

di atas penurunan Rasio Gini Perdesaan Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 14 kabupaten/kota tersebut berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Perdesaan Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 17 kabupaten/kota mengalami penurunan Rasio Gini Perdesaan lebih kecil dari -1,59% atau di bawah penurunan Rasio Gini Perdesaan Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 17 kabupaten/kota tersebut *kurang* berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Perdesaan Provinsi Jawa Timur. Tujuh kota di Provinsi Jawa Timur tidak memiliki wilayah perdesaan sehingga tidak memiliki Rasio Gini Perdesaan. Tujuh kota tersebut adalah Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penurunan Rasio Gini Perdesaan Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kabupaten Situbondo dengan penurunan Rasio Gini Perdesaan sebesar -4,56%, Kota Probolinggo dengan penurunan Rasio Gini Perdesaan sebesar -4,31%, dan Kabupaten Bondowoso dengan penurunan Rasio Gini Perdesaan sebesar -4,00%. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terendah terhadap penurunan Rasio Gini Perdesaan Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kota Batu dengan penurunan Rasio Gini Perdesaan sebesar -0,03%, Kabupaten Lamongan dengan penurunan Rasio Gini Perdesaan sebesar -0,64%, dan Kabupaten Tulungagung dengan penurunan Rasio Gini Perdesaan sebesar -0,72%.

Tanpa adanya penerapan program BPNT, Rasio Gini Perkotaan adalah sebesar 0,3798. Setelah program BPNT diterapkan, Rasio Gini Perkotaan turun menjadi sebesar 0,3770 atau turun sebesar -0,73% atau -0,0028 poin. Sebanyak 20 kabupaten/kota memiliki penurunan Rasio Gini Perkotaan lebih besar dari -0,73% atau di atas penurunan Rasio Gini Perkotaan Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 20 kabupaten/kota tersebut berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Perkotaan Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 18 kabupaten/kota mengalami penurunan Rasio Gini Perkotaan lebih kecil dari -0,73% atau di bawah penurunan Rasio Gini Perkotaan Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 14 kabupaten/kota tersebut *kurang* berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Perkotaan Provinsi Jawa Timur. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penurunan

Rasio Gini Perkotaan Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kabupaten Probolinggo dengan penurunan Rasio Gini Perkotaan sebesar -2,37%, Kabupaten Situbondo dengan penurunan Rasio Gini Perkotaan sebesar -2,26%, dan Kabupaten Bondowoso dengan penurunan Rasio Gini Perkotaan sebesar -2,17%. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terendah terhadap penurunan Rasio Gini Perkotaan Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kabupaten Pacitan dengan penurunan Rasio Gini Perkotaan sebesar -0,00%, Kota Blitar dengan penurunan Rasio Gini Perkotaan sebesar -0,11%, dan Kabupaten Bangkalan dengan penurunan Rasio Gini Perkotaan sebesar -0,15%.

Dari sisi jenis kelamin, penurunan Rasio Gini Perempuan (-1,14%) lebih besar daripada penurunan Rasio Gini Laki-laki (-1,05%) sebagai hasil dari penerapan program BPNT di Provinsi Jawa Timur. Tanpa adanya penerapan program BPNT, Rasio Gini Perempuan adalah sebesar 0,3733. Setelah program BPNT diterapkan, Rasio Gini Perempuan turun menjadi sebesar 0,3690 atau turun sebesar -1,14% atau -0,0043 poin. Sebanyak 18 kabupaten memiliki penurunan Rasio Gini Perempuan lebih besar dari -1,14% atau di atas penurunan Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 18 kabupaten tersebut berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 20 kabupaten/kota mengalami penurunan Rasio Gini Perempuan lebih kecil dari -1,14% atau di bawah penurunan Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 20 kabupaten/kota tersebut *kurang* berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur. Tiga kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penurunan Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kabupaten Situbondo dengan penurunan Rasio Gini Perempuan sebesar -3,46%, Kabupaten Bondowoso dengan penurunan Rasio Gini Perempuan sebesar -3,26%, dan Kabupaten Pamekasan dengan penurunan Rasio Gini Perempuan sebesar -2,51%. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terendah terhadap penurunan Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kota Blitar dengan penurunan Rasio Gini Perempuan sebesar -0,10%, Kota Surabaya dengan

penurunan Rasio Gini Perempuan sebesar -0,18%, dan Kota Malang dengan penurunan Rasio Gini Perempuan sebesar -0,31%.

Tanpa adanya penerapan program BPNT, Rasio Gini Laki-laki adalah sebesar 0,3676. Setelah program BPNT diterapkan, Rasio Gini Laki-laki turun menjadi sebesar 0,3638 atau turun sebesar -1,05% atau -0,0039 poin. Sebanyak 20 kabupaten/kota memiliki penurunan Rasio Gini Laki-laki lebih besar dari -1,05% atau di atas penurunan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 20 kabupaten/kota tersebut berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 18 kabupaten/kota mengalami penurunan Rasio Gini Laki-laki lebih kecil dari -1,05% atau di bawah penurunan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur sehingga bisa dinyatakan bahwa 18 kabupaten/kota tersebut *kurang* berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur. Tiga kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penurunan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kabupaten Bondowoso dengan penurunan Rasio Gini Laki-laki sebesar -3,09%, Kabupaten Situbondo dengan penurunan Rasio Gini Laki-laki sebesar -2,93%, dan Kabupaten Pamekasan dengan penurunan Rasio Gini Laki-laki sebesar -2,38%. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terendah terhadap penurunan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah Kota Blitar dengan penurunan Rasio Gini Laki-laki sebesar -0,11%, Kota Surabaya dengan penurunan Rasio Gini Laki-laki sebesar -0,17%, dan Kota Malang dengan penurunan Rasio Gini Laki-laki sebesar -0,29%.

Kesimpulan dan Rekomendasi/Implikasi Kebijakan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) pada masa pandemi Covid-19 yaitu triwulan pertama tahun 2020 mampu menurunkan Tingkat Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur berupa penurunan Rasio Gini sebesar -1,10% atau -0,0041 poin *ceteris paribus*. Tanpa penerapan program BPNT, Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada Maret 2020 adalah sebesar 0,3705. Dengan adanya penerapan program BPNT pada Januari sampai Maret 2020, Rasio Gini Provinsi Jawa Timur menurun menjadi sebesar 0,3664 atau terjadi

penurunan Koefisien Gini sebesar -1,10% atau -0,0041 poin sebagai hasil dari diterapkannya program BPNT. Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Pamekasan adalah tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan penurunan terbesar pada Rasio Gini Provinsi Jawa Timur, Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur, dan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur. Kota Blitar, Kota Surabaya dan Kota Malang adalah tiga kota di Provinsi Jawa Timur dengan penurunan terkecil pada Rasio Gini Provinsi Jawa Timur, Rasio Gini Perempuan Provinsi Jawa Timur, dan Rasio Gini Laki-laki Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Surabaya untuk memperkuat penerapan BPNT dan meningkatkan efektivitas BPNT sehingga penerapan BPNT bisa menurunkan Rasio Gini lebih besar lagi. Pemerintah di tiga kota tersebut bisa mengawalinya dengan mempelajari penerapan BPNT di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Pamekasan karena penerapan BPNT di tiga kabupaten tersebut bisa menurunkan Rasio Gini paling besar di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Referensi

- Belanawane, M., Sari, R. P., Purwanto, A. B., Yohana, J., Sabarisman, M., & Sugiyanto. (2019). *Kelembagaan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.
- BPS Indonesia. (2020). *Survei Sosial dan Ekonomi Nasional Maret 2020*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Darinda, D., & Moechtar, A. (2019). Analisis Dampak Bansos dan Subsidi atas Kemiskinan dan Ketimpangan. In T. Falyanti, H. Amir, & Y. Abimanyu, *Seri Analisis Kebijakan Fiskal - Kapita Selektif Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan: Analisis Nasional dan Regional* (pp. 61 - 98). Jakarta: PT Penerbit IPB Press.

- Munandar, Y. (2021). Decrease in the Gini Coefficient as a Result of the Distribution of BPNT during the Covid-19 Pandemic in the Province of Bangka Belitung Islands, Indonesia. *Equity Jurnal Ekonomi Vol.09 No.01: 06-2021, Juni 2021*, 51 - 60.
- Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018). *Data dan Informasi: Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian Vol.16 No.1, Juni 2018*, 1 - 18.
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Public Administration Journal Vol.2 No.2*, 96 - 110.
- Wiyaka, A., & Murti, E. (2018). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perlindungan Sosial di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2019, 19 September 2019, Fakultas Teknologi Informasi UNMER Malang* (pp. 1773 - 1778). Malang: Fakultas Teknologi Informasi UNMER Malang.